PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Rabu Tanggal: 27 November 2019 Halaman: 2

Anggaran Mamin Rp 38 M, Baru Terserap Rp 2,3 M

JOGJA, *Radar Jogja* – Program pengentasan kemiskinan di Kota Jogja, Gandeng Gendong belum berjalan sesuai rencana. Salah satu buktinya, dari total anggaran jamuan makan minum (mamin) Pemkot Jogja sebesar Rp 38 miliar, baru terserap sekitar Rp 2,3 miliar bagi kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) di sektor kuliner.

Beragam alasan menjadi penyebab minimnya penyerapan. Salah satunya adalah masa pencairan pembayaran bagi UKM yang tergolong lama. Hal ini dianggap dapat memberatkan pelaku usaha dan menghambat proses produksi.

Salah satu anggota kelompok Gandeng Gendong, yang tak ingin namanya dikorankan, menuturkan, masa pencairan dana oleh OPD tergolong lama. Sekitar 3-7 hari. Padahal tak jarang dia harus nombok untuk menutupi biaya produksi. "Memberatkan bagi kami, dulu waktu ada pesanan pernah terpaksa saya talangi dulu sampai Rp 6 juta," jelasnya seusai *review* potret program Gandeng Gendong di Griya UMKM, Kota Jogja, kemarin (26/11).

Melalui program Gandeng Gendong di sektor kuliner, Pemkot Jogja memiliki kebijakan bagi OPD untuk memprioritaskan memesan jamuan kuliner ke usaha dari kelompok masyarakat miskin saat menyelenggarakan rapat atau kegiatan.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengakui, masih ada kendala dalam program Gandeng Gendong. HP

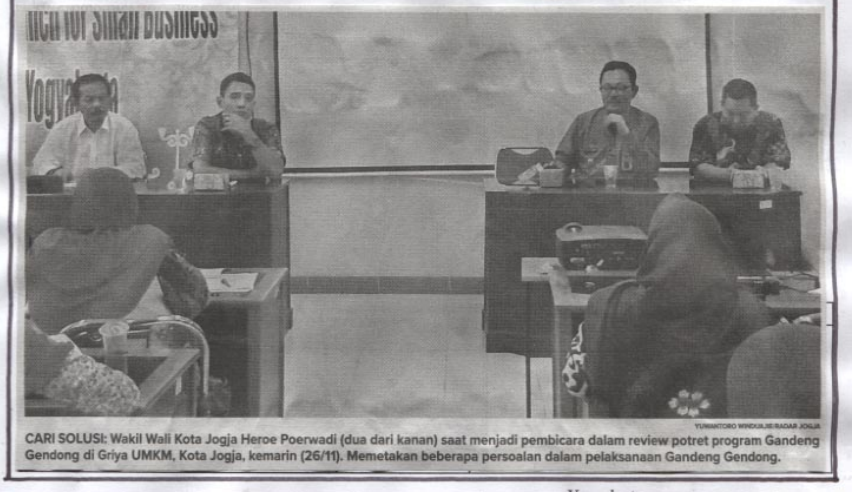

YUNIANTORO WINDUAJI/RADAR JOGJA

CARI SOLUSI: Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (dua dari kanan) saat menjadi pembicara dalam review potret program Gandeng Gendong di Griya UMKM, Kota Jogja, kemarin (26/11). Memetakan beberapa persoalan dalam pelaksanaan Gandeng Gendong.

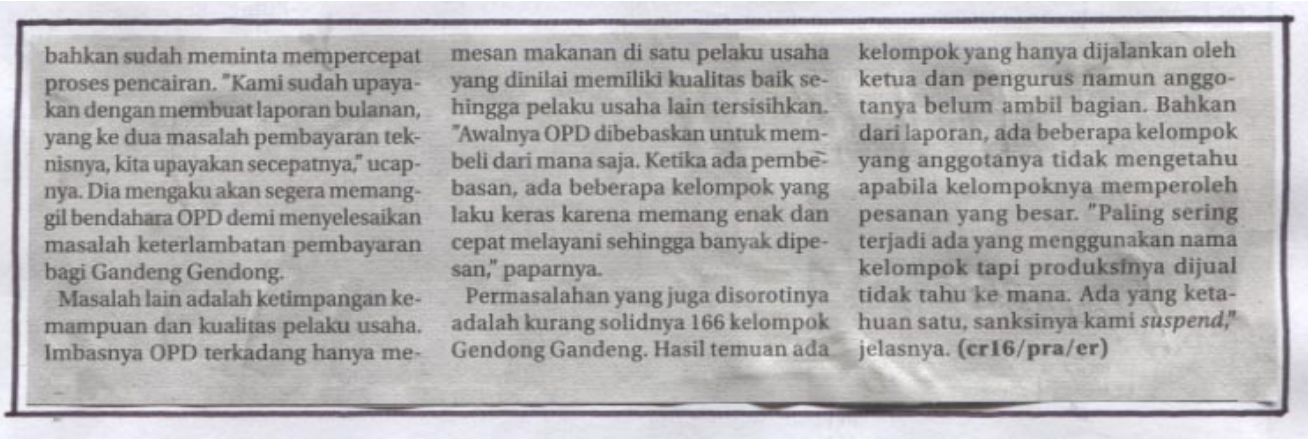

bahkan sudah meminta mempercepat proses pencairan. "Kami sudah upayakan dengan membuat laporan bulanan, yang ke dua masalah pembayaran teknisnya, kita upayakan secepatnya," ucapnya. Dia mengaku akan segera memanggil bendahara OPD demi menyelesaikan masalah keterlambatan pembayaran bagi Gandeng Gendong.

Masalah lain adalah ketimpangan kemampuan dan kualitas pelaku usaha. Imbasnya OPD terkadang hanya memesan makanan di satu pelaku usaha yang dinilai memiliki kualitas baik sehingga pelaku usaha lain tersisihkan. "Awalnya OPD dibebaskan untuk membeli dari mana saja. Ketika ada pembebasan, ada beberapa kelompok yang laku keras karena memang enak dan cepat melayani sehingga banyak dipesan," paparnya.

Permasalahan yang juga disorotinya adalah kurang solidnya 166 kelompok Gendong Gandeng. Hasil temuan ada kelompok yang hanya dijalankan oleh ketua dan pengurus namun anggotanya belum ambil bagian. Bahkan dari laporan, ada beberapa kelompok yang anggotanya tidak mengetahui apabila kelompoknya memperoleh pesanan yang besar. "Paling sering terjadi ada yang menggunakan nama kelompok tapi produksinya dijual tidak tahu ke mana. Ada yang ketahuan satu, sanksinya kami *suspend*," jelasnya. **(cr16/pra/er)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005